



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Jl. Jenderal A. Yani No. 58-Bypass Cempaka Putih Timur
JAKARTA PUSAT

Nomor : 990/DJU.1/KU.01/12/2019
Lampiran : Satu Lembar
Hal : Permintaan ADK RKA – KL DIPA 03
Tahun 2021

Jakarta, 17 Desember 2019

Yth.
Ketua Pengadilan Tingkat Banding Seluruh Indonesia
Di –
Tempat

Sehubungan dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 1619/SEK/OT.01.1/11/2019 Tentang Permintaan ADK RKA-KL 2021 dan akan disusunnya Baseline Rencana Kebutuhan Anggaran DIPA 03 Mahkamah Agung TA. 2021, maka dalam pelaksanaan hal tersebut perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pengadilan Tingkat Banding berfungsi sebagai kompilator, verifikator dan penanggungjawab dalam penyampaian usulan ADK RKA-KL DIPA 03 TA. 2021 satker dibawahnya.
2. Satuan Kerja Tingkat Banding dan Tingkat Pertama wajib melakukan penginputan data usulan anggaran TA. 2021 dengan menggunakan aplikasi RKA-KL Tahun 2020.
3. Kebutuhan usulan anggaran TA. 2021 harus disesuaikan dengan jumlah perkara yang ada berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau *Case Tracking System (CTS)*.
4. ADK RKA-KL DIPA 03 TA. 2021 **harus diusulkan melalui Tingkat Banding**, dan apabila tidak melalui mekanisme tersebut maka **dianggap tidak mengusulkan**.
5. Pengadilan Tingkat Banding wajib mengirimkan kompilasi ADK RKA-KL TA. 2021 Paling lambat tanggal 19 Desember 2019 kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Cq. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan dan ADK RKA-KL dikirim melalui email Anggaranbadilum@gmail.com.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM
SEKRETARIS



Drs. WAHYUDIN, M. Si
NIP. 19630509 198303 1 002